

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI JAWA TIMUR BAGIAN
SELATAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM EKONOMI ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH:

MUH. ASHAR SAHIZ PARDANA

NIM: 21108010132

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI JAWA TIMUR BAGIAN
SELATAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM EKONOMI ISLAM**

OLEH:

MUH. ASHAR SAHIZ PARDANA

NIM. 21108010132

PEMBIMBING:

Dr. SUNARYATI, S.E., M.Si

NIP. 19751111 200212 2 002

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-909/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI JAWA TIMUR BAGIAN SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. ASHAR SAHIZ PARDANA
Nomor Induk Mahasiswa : 21108010132
Telah diujikan pada : Senin, 13 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sunaryati, SE., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a704d4ca2e7



Penguji I

Prof. Dr. Anton Bawono, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a5da42add590



Penguji II

Rifaatul Indana, S.E.I., M.E., CMA
SIGNED

Valid ID: 6a5d9e3332a1c



Yogyakarta, 13 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
SIGNED

Valid ID: 6a71a7773eeb3

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muh. Ashar Sahiz Pardana
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di – Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Muh. Ashar Sahiz Pardana
NIM : 21108010132
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur Bagian Selatan

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 26 Juni 2026

Pembimbing


Dr. Sunaryati, S.E., M.Si.

NIP. 19751111 200212 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ashar Sahiz Pardana
NIM : 21108010132
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur Bagian Selatan” adalah benar-benar merupakan karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam body note dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 26 Juni 2026

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Muh. Ashar Sahiz Pardana
NIM. 21108010132

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ashar Sahiz Pardana

NIM : 21108010132

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

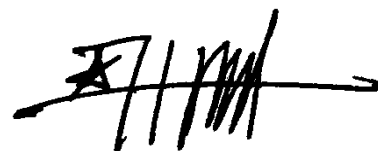
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Pengaruh Pengeluaran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Timur Bagian Selatan”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Juni 2026



Muh. Ashar Sahiz Pardana

NIM. 21108010132

HALAMAN MOTTO

“Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busono. Manungsa urip kudu memayu hayuning bawana, amarga sepira gedhene sengsara yen tinompo mung dadi coba, bakal nuntun urip marang kawicaksanan lan kasampurnaning budi.”

“Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama manusia itu setia pada hatinya sendiri atau ber-SH pada diri sendiri. Tidak ada kekuatan apapun di atas manusia yang bisa mengalahkan manusia kecuali kekuatan Tuhan Yang Maha Esa.”

—Falsafah Persaudaraan Setia Hati Terate—

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati, serta kesadaran bahwa perjalanan ini tidak pernah ditempuh seorang diri, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber segala ilmu dan kekuatan. Atas rahmat, kasih sayang, serta pertolongan-Mu, penulis mampu melewati setiap proses hingga karya ini terselesaikan. Tiada daya dan upaya tanpa kehendak-Mu.

Ibu tercinta, Ibu Suharni, sosok terkuat dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, kesabaran, serta pengorbanan yang tiada batas. Setiap langkah dan pencapaian penulis tidak terlepas dari cinta dan doa Ibu. Karya sederhana ini menjadi bentuk bakti dan rasa terima kasih yang tak akan pernah mampu membalas segala kebaikan Ibu.

Para guru dan dosen, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan nilai kehidupan yang telah diberikan. Semoga setiap ilmu yang ditanamkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya.

Keluarga besar PMII Rayon Ekuilibrium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Korp Emerald, terima kasih telah menjadi ruang belajar, bertumbuh, dan berproses. Dari kalian penulis belajar tentang perjuangan, intelektualitas, keberanian, dan arti persaudaraan yang melampaui ruang akademik.

Keluarga besar PSHT Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas nilai-nilai persaudaraan, kedisiplinan, keteguhan hati, dan keikhlasan yang telah diajarkan. Semoga nilai tersebut senantiasa menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan.

Serta, untuk ***seseorang yang kelak menemani sisa perjalanan ini***, semoga Allah mempertemukan kita dalam waktu dan ikatan terbaik yang diridai-Nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẹ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Konsonan Tunggal

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Semua *tā'* marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

--- َ ---	Fathah	ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	ditulis	U

فعل	Fathah	ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + yā' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur Bagian Selatan.”* Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah, atas rida Allah Swt. dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus salah satu mentor penulis selama menempuh studi maupun berorganisasi.
3. Bapak Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Sunaryati, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan ikhlas membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Anggari Marya Kresnowati, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta nasihat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen, pegawai dan staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Program

Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan.

Semoga Allah Swt. melimpahkan keberkahan dan membalas setiap kebaikan serta bantuan dari semua pihak dengan balasan yang terbaik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, dengan hati yang terbuka, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pembaca dan pihak-pihak yang mendalaminya. *Aamiin*.

Yogyakarta, 26 Juni 2026

Penyusun,



Muh. Ashar Sahiz Pardana

NIM. 21108010132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Landasan Teori	15
1. Teori Pembangunan Manusia	15
2. Teori Keuangan Negara dan Pengeluaran Pemerintah	28
3. Kemiskinan	48
4. Sintesis Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah, dan Kemiskinan	56
B. Kajian Pustaka	59

C.	Pengembangan Hipotesis	72
D.	Kerangka Pemikiran	83
BAB III	METODE PENELITIAN	85
A.	Jenis Penelitian	85
B.	Jenis dan Sumber Data	85
C.	Populasi dan Sampel	86
D.	Definisi Operasional Variabel	86
E.	Metode Analisis	89
1.	Metode Estimasi Regresi Data Panel	91
2.	Pemilihan Model Regresi Data Panel	93
3.	Uji Asumsi Klasik	94
4.	Uji <i>Cross-section Dependence</i> (CSD)	96
5.	Uji Stasioner Data	97
6.	Uji Hipotesis	98
7.	Uji <i>Robustness</i>	99
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
A.	Analisis Statistik Deskriptif	100
B.	Analisis Regresi Data Panel	104
1.	Hasil Estimasi Regresi Data Panel	104
2.	Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel	106
3.	Hasil Uji Asumsi Klasik	107
4.	Hasil Uji <i>Cross-section Dependence</i> (CSD)	108
5.	Hasil Uji Hipotesis	109
6.	Hasil Uji <i>Robustness</i>	115
C.	Pembahasan	120
1.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	120
2.	Implikasi Kebijakan	141
BAB V	PENUTUP	143
A.	Kesimpulan	143
B.	Keterbatasan Penelitian	145

C. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA.....	148
LAMPIRAN.....	154



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur bagian selatan 2017–2024.....	2
Tabel 1.2 Rata-rata Pengeluaran Pemerintah Jawa Timur bagian selatan menurut Fungsi 2017–2024	5
Tabel 1.3 Persentase Kemiskinan Jawa Timur bagian selatan 2017-2024	6
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	89
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	100
Tabel 4.2 Hasil Estimasi CEM	104
Tabel 4.3 Hasil Estimasi FEM	105
Tabel 4.4 Hasil Estimasi REM	105
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow, Hausman dan LM	106
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	107
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	108
Tabel 4.8 Hasil Uji CSD.....	109
Tabel 4.9 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	110
Tabel 4.10 Kesimpulan Uji T	114
Tabel 4.11 Hasil Uji <i>Robustness</i> - REM dengan PCSE SUR.....	116
Tabel 4.12 Perbandingan Hasil Estimasi REM dan REM-PCSE	117
Tabel 4.13 Belanja Pendidikan Pemerintah Daerah Mataraman Berdasarkan Jenis Belanja (Milyar Rupiah) Tahun 2024	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	83
-------------------------------------	----



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada lima fungsi, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan sosial, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur bagian selatan (Mataraman) periode 2017–2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel *Random Effect Model* (REM) yang divalidasi melalui uji ketahanan (*robustness check*) menggunakan *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE) untuk mengoreksi ketergantungan lintas-daerah. Temuan penelitian diintegrasikan dengan perspektif ekonomi Islam melalui kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja fungsi kesehatan dan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dengan kesehatan sebagai fungsi belanja yang memiliki dampak terbesar. Belanja fungsi pendidikan tidak berpengaruh signifikan setelah koreksi PCSE, mengindikasikan persoalan efektivitas alokasi yang didominasi belanja pegawai. Belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh negatif dan signifikan akibat fluktuasi dan ketidakmerataan distribusi proyek. Belanja fungsi perlindungan sosial tidak berpengaruh signifikan karena alokasi yang terbatas dan bantuan yang masih bersifat konsumtif. Tingkat kemiskinan menjadi determinan paling dominan dengan pengaruh negatif dan signifikan, sehingga pengentasan kemiskinan menjadi prasyarat utama peningkatan IPM.

Dalam perspektif ekonomi Islam, efektivitas belanja kesehatan dan ekonomi mencerminkan implementasi *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-māl*, sedangkan belum optimalnya belanja pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial menunjukkan bahwa amanah fiskal dan prinsip keadilan distribusi (*al-‘adl*) belum sepenuhnya terwujud. Implikasi kebijakan meliputi penguatan belanja kesehatan dan ekonomi, reformasi kualitas belanja pendidikan, penataan belanja infrastruktur, reorientasi perlindungan sosial menuju pemberdayaan, serta pengentasan kemiskinan secara terintegrasi.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, Jawa Timur Bagian Selatan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of government expenditure on five functions, namely economy, education, health, housing and public facilities, and social protection, as well as poverty level on the Human Development Index (HDI) in the southern part of East Java (Mataraman) during the 2017–2024 period. The analytical method employed is panel data regression using the Random Effect Model (REM), validated through robustness checks using Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) to correct for cross-sectional dependence. The findings are integrated with an Islamic economic perspective through the framework of maqāṣid al-syarī‘ah.

The estimation results reveal that health and economic expenditure have a positive and significant effect on HDI, with health spending showing the largest impact among all expenditure functions. Education expenditure is not significant after PCSE correction, indicating allocation effectiveness issues dominated by personnel spending. Housing and public facilities expenditure has a negative and significant effect due to fluctuations and unequal project distribution. Social protection expenditure is not significant because of limited allocation and the consumptive nature of assistance programs. Poverty is the most dominant determinant with a negative and significant effect, confirming that poverty alleviation is a prerequisite for improving HDI.

From an Islamic economic perspective, the effectiveness of health and economic expenditure reflects the implementation of ḥifẓ al-naḥs and ḥifẓ al-māl, while the suboptimal performance of education, housing, and social protection expenditure indicates that fiscal trusteeship (amānah fiskal) and the principle of distributive justice (al-‘adl) have not been fully realized. Policy implications include strengthening health and economic expenditure, reforming the quality of education spending, restructuring infrastructure expenditure, reorienting social protection toward empowerment, and prioritizing integrated poverty alleviation.

Keywords: *Government Expenditure, Poverty, Human Development Index, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Southern East Java*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman sumber daya alam, kondisi ekonomi, struktur sosial, dan karakteristik budaya menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat heterogenitas wilayah yang tinggi. Kondisi tersebut memengaruhi distribusi capaian pembangunan karena adanya perbedaan kapasitas pembangunan dan keunggulan komparatif antardaerah. Akibatnya, pemerataan pembangunan menjadi tantangan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan keberlanjutan pembangunan.

Tantangan tersebut tercermin pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (2026), IPM Indonesia menunjukkan tren meningkat selama periode 2017–2024, dari 70,81 pada 2017 menjadi 74,20 pada 2024. Meskipun demikian, peningkatan IPM secara nasional belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas pembangunan manusia. Disparitas masih terlihat pada kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara kawasan Indonesia bagian barat dan timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM nasional belum diikuti oleh pemerataan pembangunan manusia di seluruh wilayah Indonesia (Yulianti & Qomariah, 2025).

Kondisi ketidakmerataan pembangunan manusia tersebut dapat diamati pada salah satu subwilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu kawasan Mataraman (Jawa

Timur bagian selatan). Dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, wilayah ini termasuk dalam Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang menjadi salah satu kawasan percepatan pembangunan ekonomi (Peraturan Presiden, 2019). Kawasan tersebut meliputi Kabupaten Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Pacitan, Ponorogo, dan Ngawi, serta Kota Madiun, Kediri, dan Blitar (Alamin, 2021; Bambang, 2025).

**Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur bagian selatan
2017–2024**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Blitar	69.33	69.93	70.57	71.02	71.48	72.25	72.84	73.44
Kab. Kediri	70.47	71.07	71.85	72.80	73.31	74.20	74.68	75.18
Kab. Madiun	70.27	71.01	71.69	72.94	73.07	73.51	74.02	74.81
Kab. Magetan	72.60	72.91	73.49	74.85	75.08	75.76	76.30	76.77
Kab. Nganjuk	70.69	71.23	71.71	72.78	73.03	73.95	74.70	75.24
Kab. Ngawi	69.27	69.91	70.41	71.49	71.97	72.62	73.28	73.91
Kab. Pacitan	66.51	67.33	68.16	69.28	69.45	70.19	70.94	71.49
Kab. Ponorogo	69.26	69.91	70.56	71.57	71.81	72.59	73.18	73.70
Kab. Trenggalek	68.10	68.71	69.46	70.10	70.40	71.28	71.96	72.47
Kab. Tulungagung	71.24	71.99	72.62	73.15	73.29	74.14	74.65	75.13
Kota Blitar	77.10	77.58	78.56	78.88	79.27	80.15	80.78	81.44
Kota Kediri	77.13	77.58	78.08	78.78	79.15	80.12	80.97	81.88
Kota Madiun	80.13	80.33	80.88	81.93	82.27	83.02	83.71	84.51
Jawa Timur	70.27	70.77	71.50	73.04	73.48	74.05	74.65	75.35

Sumber: BPS Jawa Timur (data diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur bagian selatan mengalami peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2017–2024. Berdasarkan posisi relatif terhadap rata-rata Provinsi Jawa Timur, terlihat tiga pola capaian. Pertama, daerah yang secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi, yaitu Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kabupaten Magetan. Kedua, daerah yang secara konsisten berada

di bawah rata-rata provinsi, meliputi Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, dan Blitar. Ketiga, daerah dengan posisi yang berfluktuasi terhadap rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Kediri, Madiun, Nganjuk, dan Tulungagung. Pada tahun 2024, selisih IPM antara daerah dengan capaian tertinggi, yaitu Kota Madiun (84,51), dan terendah, yaitu Kabupaten Pacitan (71,49), mencapai 13,02 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan manusia di wilayah Jawa Timur bagian selatan bukan lagi terletak pada peningkatan IPM, melainkan pada belum meratanya capaian pembangunan manusia antardaerah.

Dalam ekonomi Islam, pembangunan manusia tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan atau capaian statistik, tetapi juga mewujudkan *falah*, yaitu kesejahteraan di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, pembangunan manusia mencakup aspek spiritual, moral, sosial, serta ekonomi dan fisik. Meskipun IPM bersifat sekuler, indikatornya selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu kesehatan yang mencerminkan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), pendidikan yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), serta standar hidup layak yang berhubungan dengan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) (Nurrahman et al., 2025).

Keterkaitan antara pembangunan manusia dan pengelolaan keuangan publik juga tercermin dalam perspektif *Siyasah Maliyah* (hukum keuangan negara Islam). Perspektif ini memandang keuangan negara tidak hanya sebagai instrumen penghimpunan pendapatan, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) berdasarkan skala prioritas syariah (Salsabila et al., 2026). Pemerataan pembangunan manusia dalam konteks tersebut merefleksikan keberhasilan

distribusi keuangan publik. Namun, kesenjangan IPM sebesar 13,02 poin antara Kota Madiun dan Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa prinsip keadilan distribusi (*al-'adl*) dalam tata kelola keuangan publik di Jawa Timur bagian selatan belum sepenuhnya terwujud.

Pemerintah dapat meningkatkan pembangunan manusia melalui berbagai fungsi belanja daerah. Belanja ekonomi, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas produksi dan konektivitas, berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan (Sabar, 2019; Wardhana et al., 2021).

Investasi pada kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui belanja pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh ketentuan alokasi minimal 20% APBN/APBD untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 (Hasibuan & Syahbudi, 2022), serta alokasi minimal 5% APBN di luar belanja pegawai pusat dan 10% APBD di luar belanja pegawai untuk kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Firmansyah & Wasil, 2024).

Sementara itu, belanja perumahan dan fasilitas umum menyediakan hunian layak, sarana transportasi, dan infrastruktur dasar yang menunjang kualitas hidup masyarakat (Wahyuni & Amar, 2023), sedangkan belanja perlindungan sosial berperan memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi ketimpangan, dan melindungi kelompok rentan melalui berbagai program bantuan sosial (Hayati,

2018; Wiratmoko & Purwanti, 2023). Kelima pos belanja tersebut merepresentasikan instrumen fiskal yang saling melengkapi dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Tabel 1.2 Rata-rata Pengeluaran Pemerintah Jawa Timur bagian selatan menurut Fungsi 2017–2024

Fungsi Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran (miliar rupiah)
Fungsi Ekonomi	174,71
Fungsi Pendidikan	620,52
Fungsi Kesehatan	388,67
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum	107,93
Fungsi Perlindungan Sosial	22,11

Sumber: DJPK Kemenkeu (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2, rata-rata pengeluaran pemerintah di Jawa Timur bagian selatan selama 2017–2024 didominasi oleh fungsi pendidikan (Rp620,52 miliar) dan kesehatan (Rp388,67 miliar), menandakan prioritas pada investasi sumber daya manusia. Fungsi ekonomi (Rp174,71 miliar) menempati posisi berikutnya, sedangkan fungsi perumahan dan fasilitas umum (Rp107,93 miliar) serta perlindungan sosial (Rp22,11 miliar) masih relatif rendah, yang mencerminkan terbatasnya jaring pengaman bagi kelompok rentan. Meskipun struktur belanja berorientasi pada pembangunan manusia, belum diketahui fungsi mana yang paling efektif dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia di kawasan ini.

Tingkat kemiskinan menjadi faktor lain yang mempengaruhi pembangunan manusia. Peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi faktor berkurangnya kesempatan untuk mengembangkan kapasitas manusia dan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya

cenderung bersamaan dengan penurunan tingkat kemiskinan, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup berkontribusi pada peningkatan capaian pembangunan manusia (Lumi et al., 2022).

Tabel 1.3 Persentase Kemiskinan Jawa Timur bagian selatan 2017-2024

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Blitar	9.80	9.72	8.94	9.33	9.65	8.71	8.69	8.16
Kab. Kediri	12.25	11.31	10.42	11.40	11.64	10.65	10.72	9.95
Kab. Madiun	12.28	11.42	10.54	11.46	11.91	10.79	11.04	10.63
Kab. Magetan	10.48	10.31	9.61	10.35	10.66	9.84	9.80	9.32
Kab. Nganjuk	11.98	12.11	11.24	11.62	11.85	10.70	10.89	10.17
Kab. Ngawi	14.91	14.83	14.39	15.44	15.57	14.15	14.40	13.81
Kab. Pacitan	15.42	14.19	13.67	14.54	15.11	13.80	13.65	13.08
Kab. Ponorogo	11.39	10.36	9.64	9.95	10.26	9.32	9.53	9.11
Kab. Trenggalek	12.96	12.02	10.98	11.62	12.14	10.96	10.63	10.50
Kab. Tulungagung	8.04	7.27	6.74	7.33	7.51	6.71	6.53	6.28
Kota Blitar	8.03	7.44	7.13	7.78	7.89	7.37	7.30	6.75
Kota Kediri	8.49	7.68	7.16	7.69	7.75	7.23	7.15	6.51
Kota Madiun	4.94	4.49	4.35	4.98	5.09	4.76	4.74	4.38
Jawa Timur	11.77	10.98	10.37	11.09	11.40	10.38	10.35	9.79

Sumber: BPS Jawa Timur (data diolah)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa selama periode 2017–2024, terdapat enam daerah yang secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Kediri, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, dan Trenggalek. Sebaliknya, tujuh daerah lainnya konsisten mencatat kemiskinan di bawah rata-rata provinsi, meliputi Kabupaten Blitar, Magetan, Ponorogo, Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Madiun. Terdapat disparitas yang cukup signifikan, antara yang wilayah kemiskinan tertinggi (Kabupaten Ngawi 13,81%) dan terendah (Kota Madiun 4,38%) sebesar 9,43%. Pola ini menegaskan adanya kesenjangan struktural antardaerah yang berpotensi menghambat pemerataan pembangunan manusia di kawasan ini.

Jika data IPM (Tabel 1.1) dan data kemiskinan (Tabel 1.3) dicermati secara bersamaan, terlihat pola yang kontras. Pada tahun 2024, dua daerah dengan IPM tertinggi, yakni Kota Madiun dengan nilai 84,51 dan Kota Kediri dengan nilai 81,88, masing-masing hanya mencatat tingkat kemiskinan sebesar 4,38% dan 6,51%. Sebaliknya, dua daerah dengan IPM terendah, yaitu Kabupaten Pacitan dengan nilai 71,49 dan Kabupaten Trenggalek dengan nilai 72,47, menghadapi tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi, yakni 13,08% dan 10,50%. Dua wilayah dengan capaian pembangunan manusia tertinggi mampu menekan kemiskinan hingga di bawah 7%, sedangkan dua wilayah dengan IPM terendah masih bergulat dengan kemiskinan di atas 10%. Pola ini mengindikasikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kemiskinan dan pembangunan manusia.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM menunjukkan inkonsistensi hasil. Dalam konteks belanja ekonomi, penelitian Oktafiyana & Muliati (2024) pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2010–2021 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, Wardhana et al. (2021) pada 33 provinsi di Indonesia periode 2010–2020 menunjukkan bahwa belanja fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Hasil penelitian mengenai pengaruh belanja pendidikan terhadap IPM juga menunjukkan temuan yang beragam. Hayati (2018) di Kota Banjarmasin periode 2006–2016 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, Oktafiyana & Muliati (2024)

pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2010–2021 menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, Ramadhani & Utomo (2023) pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2010–2020 menemukan bahwa belanja pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Penelitian mengenai pengaruh belanja kesehatan terhadap IPM juga menunjukkan temuan yang beragam. Sabar (2019) pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008–2017 menemukan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan. Sebaliknya, Wiratmoko & Purwanti (2023) di Indonesia periode 2008–2021 menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, Oktafiyana dan Muliati (2024) pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2010–2021 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Kajian mengenai pengaruh belanja perumahan dan fasilitas umum terhadap IPM juga menunjukkan temuan yang beragam. Halim et al. (2022) pada kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia periode 2015–2019 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah daerah fungsi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, Wiratmoko & Purwanti (2023) di Indonesia periode 2008–2021 menunjukkan tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan, Wahyuni & Amar (2023) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2011–2020 menemukan bahwa pengeluaran

belanja perumahan dan fasilitas umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Hasil penelitian mengenai pengaruh belanja perlindungan sosial terhadap IPM juga menunjukkan temuan yang beragam. Harsono et al. (2024) di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2013–2022 menemukan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sementara itu, Wiratmoko & Purwanti (2023) di Indonesia periode 2008–2021 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan. Hal berbeda, Putri & Ribawati (2025) pada 25 provinsi di Indonesia periode 2020–2024 menemukan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia masih menunjukkan temuan yang beragam. Sejumlah penelitian menemukan pengaruh positif, sementara penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif, bahkan ada yang tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan masih adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut pada wilayah Jawa Timur bagian selatan.

Studi ini memilih Jawa Timur bagian selatan sebagai lokus penelitian berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, kawasan ini didominasi wilayah semi-perdesaan dengan tingkat urbanisasi yang relatif lebih rendah dibandingkan kawasan utara Jawa Timur. Kedua, kawasan Mataraman memiliki kesamaan latar historis dan budaya yang mendukung komparabilitas antardaerah. Ketiga,

tingginya disparitas IPM dan kemiskinan antardaerah, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.3, menjadikan kawasan ini relevan untuk mengkaji pengaruh belanja pemerintah terhadap pembangunan manusia di tengah tantangan kemiskinan yang masih tinggi (Alamin, 2021). Periode 2017–2024 dipilih berdasarkan ketersediaan data BPS dan DJPK Kementerian Keuangan serta jumlah observasi yang memadai untuk analisis ekonometrika.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini menawarkan dua kebaruan. Pertama, dari sisi konseptual, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM sebagaimana studi sebelumnya, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana alokasi anggaran mencerminkan prinsip keadilan distribusi (*al-'adl*) dan pemenuhan kebutuhan dasar (*darūriyyāt*), sehingga analisis mencakup dimensi normatif selain signifikansi statistik. Kedua, dari sisi metodologis, penelitian ini mengintegrasikan lima fungsi belanja pemerintah dalam satu model serta menempatkan kemiskinan sebagai determinan struktural, bukan sekadar variabel kontrol, yang dalam perspektif Islam merefleksikan belum optimalnya jaminan sosial (*takāful ijtīmā'ī*). Pendekatan ini memungkinkan analisis hubungan belanja pemerintah dan pembangunan manusia dengan mempertimbangkan konteks kemiskinan yang melekat di wilayah kajian.

Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi kebijakan yang tinggi karena pemerintah daerah di Mataraman (Jawa Timur bagian selatan) menghadapi tuntutan meningkatkan kualitas belanja di tengah keterbatasan fiskal. Sementara

itu, alokasi anggaran masih didominasi sektor pendidikan dan kesehatan, sedangkan perlindungan sosial relatif rendah, tanpa didukung bukti empiris mengenai fungsi belanja yang paling efektif meningkatkan IPM. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penganggaran yang kurang tepat sasaran. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar penentuan prioritas belanja berbasis bukti, seperti penguatan perlindungan sosial di daerah miskin atau pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, sehingga dapat mendukung perbaikan kualitas perencanaan fiskal daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada fungsi ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Jawa Timur bagian selatan periode 2017–2024?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Jawa Timur bagian selatan periode 2017–2024?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada fungsi ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan

sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada di Jawa Timur bagian selatan periode 2017–2024.

2. Menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Jawa Timur bagian selatan periode 2017–2024.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan semua yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan antara alokasi belanja pemerintah pada berbagai fungsi, tingkat kemiskinan, dan capaian pembangunan manusia di kawasan Jawa Timur bagian selatan, serta mengasah kemampuan analisis dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memperkaya literatur ekonomi pembangunan daerah, khususnya dalam menguji efektivitas belanja publik di kawasan semi-perdesaan, serta memberikan referensi bagi studi selanjutnya yang mengintegrasikan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dalam analisis kebijakan fiskal.

3. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan berbasis bukti dalam merancang kebijakan belanja yang lebih terarah,

menetapkan prioritas sektor yang memerlukan penguatan intervensi, serta menyusun strategi pembangunan manusia yang lebih responsif terhadap tantangan kemiskinan di wilayah Mataraman.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran alur pemikiran penulis dari awal hingga akhir penelitian mengenai pengaruh berbagai fungsi pengeluaran pemerintah dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur bagian selatan.

Bab I Pendahuluan menyajikan kerangka dasar penelitian yang diawali dengan uraian latar belakang. Selanjutnya, menyajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian

Bab II Landasan Teori menguraikan kerangka teoretis yang menjadi pijakan pada penelitian, meliputi teori pembangunan, teori keuangan publik, serta teori kemiskinan. Bab ini juga menyajikan kajian pustaka, pengembangan dan perumusan hipotesis penelitian, serta kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian memaparkan rancangan metodologis yang diterapkan untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Uraian dalam bab ini mencakup jenis penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel serta metode analisis yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan memuat pemaparan temuan empiris yang diperoleh dari proses pengolahan dan analisis data. Subbab ini menyajikan analisis statistik deskriptif, hasil estimasi regresi data panel serta bagian pembahasan menginterpretasikan hasil estimasi.

Bab V Penutup memuat sintesis atas temuan penelitian yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan kalangan akademisi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Model* (REM) yang telah diuji ketahanannya melalui *robustness check* menggunakan *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE), diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, belanja fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Setiap kenaikan 1 persen belanja ekonomi meningkatkan IPM sebesar 0,0078 poin. Temuan ini berkaitan dengan karakteristik Mataraman yang didominasi sektor pertanian dan UMKM, sehingga investasi pada konektivitas, irigasi, dan sektor produktif mampu memperluas akses ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kedua, belanja fungsi pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM setelah koreksi terhadap ketergantungan lintas-daerah. Meskipun memiliki rata-rata alokasi terbesar, yaitu Rp651,59 miliar per tahun, besarnya anggaran belum diikuti peningkatan IPM. Kondisi ini berkaitan dengan dominasi belanja pegawai, rendahnya belanja peningkatan mutu pembelajaran, dan belum meratanya akses pendidikan berkualitas.

Ketiga, belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM serta menjadi fungsi belanja dengan pengaruh terbesar dalam model. Setiap kenaikan 1 persen belanja kesehatan meningkatkan IPM sebesar 0,0213 poin. Efektivitas ini didukung oleh program yang berkaitan langsung dengan

pembangunan manusia, seperti imunisasi, perbaikan gizi, penanganan stunting, dan perluasan akses JKN.

Keempat, belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja infrastruktur belum otomatis memperbaiki pembangunan manusia akibat fluktuasi alokasi dan ketimpangan distribusi antarwilayah. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penguatan tata kelola agar belanja infrastruktur lebih tepat sasaran.

Kelima, belanja fungsi perlindungan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Rendahnya rata-rata alokasi sebesar Rp21,55 miliar per tahun dan dominasi bantuan konsumtif menyebabkan dampaknya terhadap pembangunan manusia belum optimal. Temuan ini menunjukkan perlunya reorientasi belanja menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Keenam, tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM serta menjadi determinan paling dominan dalam model. Setiap kenaikan 1 poin persentase kemiskinan menurunkan IPM sebesar 1,033 poin. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan hambatan struktural bagi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan prasyarat utama peningkatan pembangunan manusia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja pemerintah dalam meningkatkan IPM di kawasan Mataraman lebih ditentukan oleh kualitas pengelolaan, ketepatan sasaran, dan kesesuaian dengan

karakteristik wilayah daripada besarnya anggaran. Belanja kesehatan dan ekonomi terbukti paling efektif, sedangkan belanja pendidikan, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan sosial memerlukan perbaikan kebijakan. Kemiskinan tetap menjadi penghambat utama pembangunan manusia.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan studi selanjutnya.

1. Periode observasi yang relatif pendek (2017–2024) belum sepenuhnya menangkap dampak jangka panjang belanja pemerintah, terutama pada fungsi pendidikan dan infrastruktur yang memiliki *lag effect*.
2. Cakupan penelitian terbatas pada 12 kabupaten/kota di Jawa Timur bagian selatan (Mataraman), sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain perlu dilakukan secara hati-hati.
3. Model belum mengakomodasi aspek spasial meskipun hasil *cross-section dependence* mengindikasikan adanya *spillover effect* antarwilayah.
4. Model belum memasukkan beberapa faktor lain, seperti PDRB per kapita, tingkat pengangguran, PAD, dana transfer, kualitas tata kelola, dan investasi swasta.
5. Penelitian menggunakan data realisasi belanja sehingga belum mengevaluasi efektivitas berdasarkan output maupun kualitas layanan publik.

Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode observasi, memperluas cakupan wilayah, menerapkan ekonometrika spasial, serta menambahkan variabel ekonomi dan kelembagaan. Pengukuran efektivitas belanja juga dapat

dikembangkan dengan mengombinasikan data anggaran dan indikator output layanan publik agar memberikan gambaran pembangunan manusia yang lebih komprehensif.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, berikut adalah saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan peneliti selanjutnya:

1. Saran untuk Pemerintah Daerah

- a) Memprioritaskan belanja kesehatan dan ekonomi. Belanja kesehatan difokuskan pada layanan primer, pencegahan stunting, perbaikan gizi, dan pemerataan akses, sedangkan belanja ekonomi diarahkan pada konektivitas, infrastruktur produktif, serta penguatan pertanian dan UMKM, terutama di wilayah tertinggal.
- b) Meningkatkan *quality of spending* belanja pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, sarana pembelajaran, dan pemerataan akses.
- c) Menata belanja perumahan dan fasilitas umum agar lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan air bersih, sanitasi, dan akses jalan di wilayah tertinggal.
- d) Mereorientasi belanja perlindungan sosial dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan melalui perbaikan data penerima manfaat, pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha.
- e) Menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama melalui program terpadu di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

- f) Memperkuat tata kelola fiskal melalui perencanaan berbasis kebutuhan, ketepatan sasaran, transparansi, pengawasan, dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Memperpanjang periode observasi agar mampu menangkap dampak jangka panjang (*lag effect*) dari belanja pemerintah, terutama pada sektor pendidikan dan infrastruktur.
- b. Menambahkan variabel yang lebih komprehensif, seperti PDRB per kapita, tingkat pengangguran, PAD, dana transfer, kualitas tata kelola pemerintahan, dan investasi swasta.
- c. Menggunakan pendekatan pengukuran efisiensi belanja, seperti *Data Envelopment Analysis* (DEA) atau *Stochastic Frontier Analysis* (SFA), agar analisis tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga kualitas dan efektivitas pengelolaannya.
- d. Mengembangkan model ekonometrika spasial, seperti *Spatial Autoregressive Model* (SAR) atau *Spatial Error Model* (SEM), untuk menangkap kemungkinan *spillover effect* antardaerah.
- e. Memperluas kajian berbasis ekonomi Islam secara kuantitatif dengan memasukkan indikator seperti zakat, wakaf, atau indeks *maqāṣid al-syarī'ah* guna mengukur dimensi keadilan sosial dan kesejahteraan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat, N. T., Canon, S., Akib, F. H. Y., & Olilingo, F. Z. (2025). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kemandirian Fiskal Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang Dimoderasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan (JSEP)*, 3(1), 505–516. <https://doi.org/10.37905/jsep.v3i1.33221>
- Al-Ghazali, A. H. (1986). *Ihya' Ulumuddin*. Daar al-Kutub al-Ilmiah.
- Alamin, T. (2021). Pola Harmoni Sosial Masyarakat Mataraman Di Kota Kediri. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 5(2), 137–162. <https://doi.org/10.30762/asketik.v5i2.702>
- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203–214. <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>
- Arfiyansyah, S., & Khusaini, M. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Arifin, M. Y., Suswandi, P. E., & Adenan, M. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006–2013. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–7.
- Asmuni. (2008). Power dan Empowerment Sebagai Paradigma Pembangunan Era Globalisasi. *Forum Pendidikan & Ilmu Pengetahuan, Jurnal Pendidikan*, 3(6), 26–48.
- Astri, M., Nikensari, S. I., & W, H. K. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS*, 1(1), 77–102. <https://doi.org/10.21009/JPEB.001.1.5>
- Atmawikarta, A. (2009). *Investasi Kesehatan untuk Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia 2024* (Vol. 19).
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Statistik Indonesia 2026*.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd ed.). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Bambang. (2025, November). *Pemekaran Wilayah Jawa Timur: Wacana Pembentukan Provinsi Mataraman atau Jawa Selatan Menjadi Dilema*. Palpos.Disway.Id.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Beck, N., & Katz, J. N. (1995). What to Do (and Not to Do) with Time-Series Cross-Section Data. *American Political Science Review*, 634–647.

<https://doi.org/10.2307/2082979>

- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Ekonomi*, 22(2), 1–12.
- Chambers, R. (1998). *Pengembangan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fajar, M. A., & Indrawati, L. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 108–118.
- Ferdiansyah, A. B., & Febrianti, G. R. (2025). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 9(1), 18–39.
- Fernando, B., & Yustie, R. (2025). Pengaruh Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi-Provinsi Indonesia Tahun 2020-2024. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* Volume, 25(2), 267–278. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.27634>
- Firmansyah, A. H., & Wasil, M. (2024). Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB Terhadap Peningkatan IPM di Indonesia Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1), 54–65. <https://doi.org/10.26905/jrei.v5i1.13048>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, R. Z., Siregar, M. R., & Masrizal. (2019). *Keuangan Publik Islam: Zakat sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara*. 19(2), 100–116.
- Habibah, N. (2023). Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an. *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis*, 3(1), 49–63. <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v3i1.1163>
- Halim, A., Rahayu, D., & Muzdalifah. (2022). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kab/Kota dan 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015–2019). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 12256–12268.
- Harsono, I., Purnama, I., Irwan, M., Muhammad, F., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi NTB Tahun 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(1), 802–810. <https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.4048>
- Hasibuan, S. A., & Syahbudi, M. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Masharif Al-*

- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4), 1158–1166.
<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13218>
- Hayati, N. (2018). Faktor-Faktor Mempengaruhi IPM di Kota Banjarmasin. *JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 187–193.
- Indiati, P. S. T., Taufiq, M., Oktafia, R., & Sandi, P. M. (2024). Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap IPM Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 734–743.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14436683>
- Kali, K. P. I. B., & Brata, A. G. (2016). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi-Provinsi Kawasan Indonesia Bagian Timur Periode 2006–2013. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran*.
- Lindrianti, N. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Dana dari Pusat terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015–2020. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(1), 46–56. <https://doi.org/10.14710/djoe.32822>
- Lubis, C. K. S., Sari, C. M., Syahfitri, T. I., & Suharianto, J. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara Tahun 2019-2022. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 738–755.
- Lumi, A. N. M., Kindangen, P., & Rorong, I. P. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (Studi pada 8 Kabupaten di Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(2), 220–244. <https://doi.org/10.35794/jpekd.44225.23.2.2022>
- Mahfuzat, Hamid, A., Yunus, Nabila, S. V., & Dzunurain. (2024). Mandatory Spending dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 5041–5050.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6889>
- Mangkoesoebroto, G. (2018). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE UGM.
- Melliana, A., & Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni POMITS*, 2(2), 2337–3520.
- Mourmouras, I. A., & Lee, J. E. (1999). Government Spending on Infrastructure in an Endogenous Growth Model with Finite Horizons. *Journal of Economics and Business*, 51(5), 395–407. [https://doi.org/10.1016/S0148-6195\(99\)00014-4](https://doi.org/10.1016/S0148-6195(99)00014-4)
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Book Co.
- Nurkholis, A. (2018). *Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory*. 1–16.

- <https://doi.org/10.31227/osf.io/8trv7>
- Nurrahman, A. G., Miptahudin, I., Fajrussalam, H., Rhommadhonni, V. N. R., & Prabandari, F. (2025). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Konseptual dan Relevansinya terhadap Tujuan Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 197–203. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1612>
- Oktafiyana, E., & Muliati. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan serta Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 20(1), 88–96.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Peraturan Presiden. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, Kawasan Bromo–Tengger–Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan*.
- Pesaran, M. H. (2004). *General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels*.
- Prayoga, M. L., Muchtolifah, & Sishadiyanti. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 135–143. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11058>
- Putri, A. A. R., & Ribawati, E. (2025). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Belanja Bantuan Sosial, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2020–2024. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4(3), 25–48. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i3.363>
- Rafsanjani, H. (2018). *Islamic Human Development Index Di Indonesia*. UMSurabaya Publishing.
- Ramadhani, N., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur Tahun 2010-2020. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 269–276.
- Ramandini, N., & Jaharuddin. (2024). Krisis Ekonomi dan Pemulihan Pasca Pandemi: Pembelajaran dari Resesi Global 2020 dan Strategi untuk Membangun Kembali. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4554–4565. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4471>
- Ramdayani, S. S., Kharisma, B., & Wibowo, K. (2019). Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial, Ketertiban dan Keamanan, serta Kriminalitas. *Jurnal Economia*, 15(2), 259–274. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i2.26828>
- Rosdaniah, & Azizs, A. (2024). Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 112–124. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol2i1.2024.112-124>
- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sabar, W. (2019). Efek Belanja Modal Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *EcceS: Economics, Social, and Development Studies*, 6(2), 171–189.

- <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.10920>
- Salsabila, S. S., Suntana, I., & Saleh, C. (2026). Implementasi Pertanggungjawaban Negara terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 di Kabupaten Garut Perspektif Siyasaah Maliyah. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* ISSN:, 13(4), 69–79. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i4.751>
- Sari'ah, K., & Mukhsinun. (2024). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah dalam Prespektif Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tahun 2019–2023. *Jurnal of Management, Economics, and Entrepreneur*, 3(2), 181–211.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Scott, Z. (2012). *Topic Guide on Social Protection*. Birmingham: Governance and Social Development Resource Center.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Shilat, N. F., Andreansyah, F., & Firdaus, L. A. (2024). Kemiskinan dalam Islam: Faktor Penyebab dan Solusinya. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 3(2), 40–44. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.167>
- Simamora, S. E., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 482–493. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2697>
- Siregar, R., Nasution, H. F., & Tanjung, S. F. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(1), 82–105. <https://doi.org/10.24952/masharif.v5i2.1439>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryadi, A., & Kurniawan, F. T. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(1), 196–204. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i1.7147>
- Thohir, M. M. bin. (2016). Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin. *Iqtishoduna*, 8(2), 76–93.
- Todaro, M. P. (2000). *Economic Development*. New York: University Addison Mesley.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development 13th ed. (13th ed.)*. Pearson.
- Ulfatussaniah, A., Murwiati, A., & Wahyudi, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Tiga Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera. *Journal on Education*, 06(03),

- 16720–16729. <https://doi.org/doi.org/10.31004/joe.v6i3.5550>
- United Nations Development Programme. (1990). *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press.
- Wahyuni, A., & Amar, S. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. *JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 29–36. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i1.14418>
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Sulandari, D. S. (2021). Belanja Pemerintah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 5(2), 139–151. <https://doi.org/10.31294/eco.v5i2.10168>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan eViews* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wiratmoko, A. O. T., & Purwanti, L. (2023). Impact of Government Expenditure on Human Development Index in Indonesia by Functions. *The EUrASEANS: Journal on Global Socio-Economic Dynamics*, 8(6), 191–201. [https://doi.org/10.35678/2539-5645.6\(43\).2023.191-201](https://doi.org/10.35678/2539-5645.6(43).2023.191-201)
- Yuliana, Y., Adamy, Y., Danerlly, D., & Faqroni, F. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Ekonomi Dan Fungsi Pelayanan Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 7(1), 8–14. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v7i1.3946>
- Yulianti, Y., & Qomariah, S. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Ilmu Pengetahuan. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 5(1), 203–213.
- Yusuf, M., Lihawa, F., & Baderan, D. W. K. (2024). Kajian Indeks Pembangunan Manusia sebagai Indikator Pengukuran Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3(2), 262–273. <https://doi.org/10.58169/jwikal.v3i2.653>